



PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus



**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Tahun 2023**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus Yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tahun 2023 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

NO	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET				ANGGARAN
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	69	69	69	69	Program 1: Program dukungan manajemen RP. 25.046.913.000 Kegiatan 1: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan
		b	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	
		d	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30	30	30	30	

							administrasi RP. 25.036.913.000	
							Indikator Kegiatan 1: Layanan dukungan manajemen Non Operasional Satker daerah RP. 25.036.913.000	
		e	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	1	1	1	1	Program 1: Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung RI
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	86	86	86	86	Kegiatan 1: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI
		g	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	100	100	100	100	RP. 10.000.000
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	a	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	55	55	55	55	Indikator Kegiatan 1: Pengadaan layanan sarana dan prasarana internal RP. 10.000.000
		b	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	
		c	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	12	12	4	4	
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	80	80	100	100	Program 1: Program peningkatan manajemen peradilan umum
		b	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	

4.	Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat akan keputusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	30	30	20	20	Rp. 687.203.000 Kegiatan 1: Peningkatan manajemen peradilan umum Rp. 687.203.000 Indikator Kegiatan 1: Layanan Posbakum dan Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu Rp. 72.000.000
----	--	---	---	----	----	----	----	---

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Pendaftara Berkas Perkara	√	√	√	√	Perkara peradilan yang diselesaikan di pengadilan dan banding yang tepat waktu Program Peningkatan Manaajemen Peradilan Umum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen	612,438,000
2	Penetapan Hari Sidang	√	√	√	√		Penyelenggaraan Layanan Perkantoran		
3	Pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√				
4	Minutasi/Upaya Hukum	√	√	√	√		Penyelenggaraan Layanan Internal		
5	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	√	√	√	√				

6	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	√	√	√	√	Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum			
7	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Negeri Jakarta Barat	√	√	√	√				Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu
8	Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Barat	√	√	√	√				

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	ANGGARAN (RP.)
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Presentasi Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	1.265.000
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	RP.
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√	Penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Layanan Posbakum	72.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW I (%)	TW II (%)	TW III (%)	TW IV (%)	ANGGARAN (RP.)
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	20	20	20	20	2.460.000

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Di Eksekusi)	√	√	√	√	Perkara peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	480.000



A. BONDAN, SH., MH.
NIP. 196601281992121001